

# UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN TAHUN 2015-2018

**Reineke Audreya M N, Ganjar Widhiyoga, Andika Drajat M**  
**Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta**  
**Email: [audreyanelwan@gmail.com](mailto:audreyanelwan@gmail.com)**

## ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan studi politik dan diplomatik yang menjelaskan peran UNICEF dalam membebaskan tentara anak di Sudan Selatan. Kajian penelitian ini fokus pada bagaimana UNICEF menyelesaikan pembebasan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2018. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana UNICEF membebaskan tentara anak di Sudan Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dari Clive Archer dan keamanan internasional yang membahas mengenai human security. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang menangani tentang anak, melalui permasalahan tentara anak dibutuhkan peran organisasi internasional yang dapat menjadi fasilitator, komunikator dan motivator yang dapat bekerjasama dengan pemerintah dan tentara oposisi dalam membebaskan tentara anak. Dalam penggunaan tentara anak merupakan sebuah pelanggaran human security yang mempengaruhi keamanan internasional. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan beberapa program yang akan dijalankan untuk membebaskan dan memfasilitasi para korban tentara anak di Sudan Selatan.*

*Kata Kunci : Organisasi Internasional, Human Security, Tentara Anak, UNICEF*

## ABSTRACT

*This research is a political and diplomatic study describing the role of UNICEF in resolving the problem of Child Soldier in South Sudan. This research study focus on how UNICEF resolve the release of Child Soldier in South Sudan on 2015-2018. The purpose of this research is to know how UNICEF can release the Child Soldier in South Sudan. This research use qualitative research method with source of data is primary and secondary. This research uses the International Organization theory from Clive Archer and international security discussing human security. UNICEF is one of the many international organization handling child problem. Dealing with child soldier matter, it is needed the role of international organization as a facilitator, communicator, and motivator capable of cooperating with government and opposition soldier in releasing child soldier. The exploitation of child soldier is a violation of human security that effect international security. The result of this research show some programs to be implemented to free and facilitating the victim of child soldier in South Sudan.*

*Keywords: International organization, human security, child soldier, UNICEF*

## PENDAHULUAN

Situasi yang terjadi di dunia saat ini sangat mengkhawatirkan, konflik dan perang yang terjadi di dalam maupun luar negara yang dilakukan oleh manusia. Peperangan yang terjadi akan menciptakan kerugian dan penderitaan bagi manusia. Salah satu korban dalam peperangan adalah anak-anak tetapi anak-anak tidak hanya menjadi korban saja melainkan juga dapat menjadi pelaku dalam peperangan. Hal ini disebut sebagai tentara anak (*Child Soldier*). Di Sudan Selatan anak-anak diculik dan dipaksa untuk bergabung menjadi tentara anak (Okiror,

2019). Sudan Selatan sebelumnya merupakan bagian dari negara Sudan sejak tahun 1956, lalu kedua negara mengalami perpecahan dan konflik berkepanjangan maka sepakat untuk mengakhiri perang saudara melalui *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) tahun 2005 (BBC.com, 2018). Sudan Selatan mengajukan *self determination* dan keberhasilan referendum yang ditunjukkan dengan deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan pada tanggal 9 Juli 2011 serta menjadi negara anggota termuda yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 13 Juli 2011 (Firman, 2017).

Kasus tentara anak di Sudan Selatan bermula dari konflik yang terjadi pada 2013, ketegangan politik yang terjadi antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon yang juga merupakan pemimpin *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) (Firman, 2017). Namun, peristiwa penting dalam konflik ini merupakan pembantaian yang terjadi pada etnis Juba yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Dinka. Konflik ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh ketegangan politik saja melainkan antar etnis dan pemberontakan senjata oleh milisi berbasis etnis (Right, 2014). Akibat dari perang ini warga sipil menjadi korban, selama terjadinya operasi di kota Yambio, Wau dan Yei tentara menargetkan dan membunuh puluhan warga sipil dan melakukan berbagai pelanggaran lain, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan terhadap tahanan dan penahanan paksa. Anak-anak dan perempuan menjadi korban dari perang ini, mereka dieksploitasi sebagai tenaga kerja ataupun tentara anak. Anak perempuan dipekerjakan sebagai juru masak, kuli angkut serta mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual (Okiror, 2019).

Sekitar 400.000 anak dipaksa keluar dari sekolah. Perekrutan dan penggunaan tentara anak terjadi dalam perang yang dilakukan oleh SPLA dan pemerintah (Soemantri, 2019). *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan tentara anak (*Child Soldier*) adalah setiap anak yang dibawah usia 18 tahun yang telah direkrut dan digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun (UNICEF, n.d.). Menurut UNICEF diperkirakan 19.000 anak telah direkrut oleh angkatan bersenjata dan kelompok dari kedua belah pihak dalam konflik sejak 2013 dan lebih dari 2.300 anak tewas dan terluka (International, 2018). Tentara atau pasukan bersenjata menggunakan sekolah sebagai rumah dan mencegah anak-anak untuk mengakses pendidikan (Right, 2016). Perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata dengan menggunakan metode penculikan dan wajib militer dari rumah ke rumah dan menargetkan sekolah (UN, 2020).

PBB menerima kesaksian dari anak laki-laki berusia empat belas hingga tujuh belas tahun di Juba ditahan oleh pasukan keamanan serta mengalami trauma akibat perlakuan kekerasan. Pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya dilaporkan 22 insiden yang menjadi korban 36 anak yaitu empat laki-laki dan 32 perempuan (UN, 2015). Tahun 2015 terjadi sepuluh serangan terhadap sekolah yang dilakukan oleh SPLA, mereka melakukan penghancuran, perusakan, penjarahan dan perekrutan anak-anak. Insiden yang terjadi di Upper Nile State 36 anak ditangkap. Anak-anak mengenakan seragam militer dan membawa senjata di wilayah Nil atas dan Bahr el-Ghazal. Pada tahun 2016 terdapat 5.666 anak yang direkrut serta 1.755 anak dibebaskan di wilayah Administratif Pibor Raya dan anak-anak bergabung dalam program reintegrasi (UN, 2016). Tahun 2017 terdapat 1.407 perekrutan dan 26 pemerkosaan yang dilakukan oleh kelompok senjata, terdapat upaya advokasi PBB 32 anak laki-laki di Unity dibebaskan dan 148 anak laki-laki dibebaskan di Jonglei (UN, 2017).

Sekitar 52 persen anak-anak yang direkrut dan terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok dalam peran pendukung termasuk sebagai juru masak, kuli angkut, mata-mata dan pengawal. Terdapat 48 persen anak-anak yang direkrut, dipersenjatai, dilatih dan digunakan dalam pertempuran aktif. Anak-anak ditugaskan untuk mengoperasikan pos pemeriksaan militer terutama daerah yang dikendalikan oleh tentara oposisi. Pada tahun 2018 terdapat 54 anak tewas atau cacat dan 58 anak mengalami kekerasan seksual dalam perekrutan dan saat menjalankan tugas sebagai tentara anak (UN, 2020).

Saat ini perang atau konflik rawan terjadi dan hal tersebut membuka potensi terjadinya eksploitasi anak sangatlah besar, dilain sisi anak merupakan generasi penerus bangsa. Eksploitasi anak beresiko merusak proses tumbuh kembang anak dan ini dapat menyebabkan anak tidak dapat memberikan perubahan baik pada generasi mendatang. Anak-anak merupakan golongan paling mudah untuk dieksploitasi, karena kurangnya wawasan, pengalaman maupun perlindungan diri dari pemerintah maupun internasional sehingga hal ini dibutuhkannya tindakan tegas dari beberapa pihak untuk menghentikan perekrutan anak yang terjadi di Sudan Selatan. salah satunya adalah UNICEF yang merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak. Diperlukannya peran UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di Sudan Selatan agar dapat memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani pembebasan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2017?

Peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Darfur, Sudan periode 2003-2005, penelitian ini ditulis oleh Grace M.S.N Sihombing, dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat mengenai konflik yang terjadi di Darfur dalam penggunaan tentara anak dan peran UNICEF untuk mengatasi perekrutan tentara anak. Terdapat 3 peran UNICEF yaitu peran sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada dunia agar peduli, mendukung dan melindungi hak anak. Kedua, sebagai komunikator meliputi pengumpulan data untuk dilaporkan ke forum. Ketiga, sebagai perantara dengan mengupayakan dana, daya dan upaya serta keahlian yang diperlukan masyarakat dalam pembebasan sejumlah anak yang bergabung dalam kelompok bersenjata.

Peran UNMISS (*United Nations Missions in South Sudan*) dalam pembebasan tentara anak di Sudan Selatan, penelitian ini ditulis Bobby Soemantri, dalam jurnal ini menjelaskan peran UNMISS dalam pembebasan tentara anak di Sudan Selatan. UNMISS merupakan misi perdamaian yang dibentuk oleh PBB untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Sudan Selatan. UNMISS berperan sebagai komunikator dalam memberikan laporan kepada PBB. Kedua, sebagai fasilitator bekerjasama dengan pihak pemerintah dan oposisi dalam menangani permasalahan tentara anak. Ketiga, sebagai motivator yang membebaskan tentara anak dan memberikan pelatihan bagi mantan tentara anak.

Dalam penelitian di atas berbeda dengan fokus penelitian penulis dan membantu penulis untuk menganalisis dalam penggunaan tentara anak. Dalam penelitian ini akan menjelaskan pada upaya UNICEF dalam menangani pembebasan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2018.

### **KERANGKA ANALISIS**

Saat ini negara bukan satu-satunya aktor dalam dunia internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yang pertama menjelaskan mengenai peran organisasi internasional dan yang kedua menjelaskan mengenai studi keamanan internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota, baik perwakilan pemerintah atau non-pemerintah setidaknya dua negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama (Archer, 2001). Menurut Duverger, organisasi internasional merupakan salah satu bentuk organisasi hubungan internasional yang dapat dilihat dari institusi yang berbentuk

kolektif atau struktur dasar organisasi sosial yang ditetapkan oleh hukum atau tradisi manusia yaitu perdagangan, diplomasi atau konferensi (Duverger, 1972).

Archer membagi tiga peranan utama dalam organisasi internasional yang pertama, organisasi internasional sebagai wadah yang digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai kepentingan nasional negara anggotanya. Kedua, organisasi internasional sebagai aktor yang dapat berjalan secara mandiri dan tidak bergantung pada anggota lainnya. Ketiga, organisasi internasional sebagai tempat yang memiliki posisi netral dan sebagai fasilitator untuk bertukar kepentingan antar negara anggotanya (Archer, 2001). Dari penjelasan diatas posisi UNICEF di Sudan Selatan menurut penulis berada pada posisi sebagai fasilitator, komunikator dan motivator yang melakukan tugas-tugas dalam menyelesaikan isu yang terjadi dalam masyarakat. UNICEF fokus kepada proses dan program yang dijalankan dan diberikan tanggung jawab oleh negara maupun pihak berwenang untuk melakukan aktivitasnya dalam masyarakat. Fungsi dari organisasi internasional membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan dimasyarakat.

Teori kedua yang penulis gunakan untuk menjawab penelitian ini adalah studi keamanan internasional. Menurut Barry Buzan dan Lene Hansen keamanan berkaitan dengan tujuan politik dan norma dalam menjelaskan keamanan sebagai konsep. Keamanan menjadi konsep yang berkaitan dengan negara sebagai objek khusus, lokasi eksternal ataupun internal serta beberapa sektor yang berkaitan dengan cara pandang politik (B. and L. H. Buzan, 2009). Sejak perang dunia II telah muncul beberapa teori pendekatan yang berusaha membuat penjelasan komprehensif mengenai keamanan internasional. Terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan tradisional (*traditional security approach*) dan pendekatan non-tradisional (*non-traditional approach*).

Pendekatan tradisional menjelaskan mengenai keamanan internasional yang berfokus pada negara sebagai aktor utama dan penggunaan militer. Jadi dalam konsep keamanan pendekatan tradisional merupakan kondisi dimana terbebasnya dari ancaman militer atau kemampuan negara dalam melindungi keamanan nasionalnya dari serangan internal maupun eksternal (B. Buzan, 1991). Sedangkan, pendekatan non-tradisional keamanan tidak hanya berfokus pada negara saja melainkan juga untuk melindungi setiap individu, kelompok dan lingkungan. Keamanan tidak hanya mengenai militer saja tetapi lebih luas seperti ekonomi dan lingkungan (B. and L. H. Buzan, 2009).

Dalam studi keamanan internasional, keamanan individu tergolong dalam pendekatan non-tradisional, karena di dalam pendekatan ini tidak berfokus pada negara melainkan terhadap

individu ataupun kelompok. Pendekatan non-tradisional menitikberatkan pada keamanan manusia sehingga perkembangan konsep ini disebut sebagai konsep *human security*. *Human security* memiliki dua aspek utama, keselamatan pertama dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkup rumah, pekerjaan ataupun lingkungan masyarakat. Terdapat tujuh komponen penting dari keamanan manusia yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas dan keamanan politik (Paris, 2001).

Berdasarkan resolusi sidang umum PBB 66/290 pada 10 September 2012 merupakan hal penting dalam penerapan *human security* dan mengartikannya pada paragraf 3 resolusi, bahwa *human security* adalah pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi dan menangani tantangan yang luas dan lintas sektoral untuk kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat masyarakat mereka. Untuk mencapai *human security* yang maksimal dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, regional serta masyarakat sipil (Nation, 2016). Dalam analisis konsep *human security* memandang bahwa penggunaan tentara anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar keamanan manusia, karena anak-anak merupakan individu dan berhak mendapatkan kesejahteraan untuk pendidikan yang layak, kebutuhan gizi yang cukup serta memerlukan perlindungan dari kekerasan fisik baik dari negara ataupun individu yang melakukan kekerasan dan aktor sub-negara. Oleh karena itu kesejahteraan dan keamanan individu bukanlah suatu hal yang dianggap sebelah mata karena dampak yang ditimbulkan dapat mengganggu kedamaian masyarakat, tingkat produktivitas masyarakat menurun dan ekonomi serta keamanan negaranya terganggu.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber daya dari jurnal, buku, artikel, analisis dokumenter dengan pendekatan teoritis yang berbeda (Woods, 2006). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain (Kothari, 2004). Penulis menggunakan data primer yang berasal dari

website resmi serta data sekunder yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel media massa yang berupa artikel maupun video yang memiliki kesesuaian dalam menjawab masalah penelitian.

Objek penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam pembebasan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2018. Dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Dokumen pustaka yang dimaksud adalah buku, jurnal, koran dan artikel setelah dokumen dikumpulkan peneliti akan menganalisis data tersebut. Sumber yang digunakan adalah sumber yang berkaitan dengan upaya UNICEF dalam menangani konflik, terutama berkaitan dengan tentara anak. Dokumen resmi atau arsip yang digunakan penulis dalam penelitian ini seperti draft Annual Report UNICEF, *Human Right Watch*, draft *United Nation Security Council*. Surat kabar online maupun offline mengenai UNICEF di Sudan Selatan yang mendukung penelitian penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## **PEMBAHASAN**

Sudan Selatan terletak di timur laut Afrika. Ibu kota dari Sudan Selatan adalah Juba. Sudan Selatan secara resmi dikenal sebagai Republik Sudan Selatan. Secara geografis Sudan Selatan berbatasan dengan Sudan di sebelah utara, Etiopia di sebelah timur, Kenya, Uganda dan Republik Demokratik Kongo di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Republik Afrika Tengah (Firman, 2017).

Meskipun Sudan Selatan merupakan negara termuda tetapi tidak asing dengan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Perang saudara Sudan Selatan terbaru dimulai pada pertengahan desember 2013, ketika tentara yang setia pada Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar yang memimpin pemberontakan bertempur di ibu kota Juba. Saat pertempuran menyebar, kedua belah pihak menargetkan dan membunuh warga sipil termasuk dalam pembantaian yang seringkali berdasarkan etnis mereka (hrw.org, 2015). Akibat dari konflik ini menghancurkan sektor pendidikan yang menyebabkan penutupan tujuh puluh persen sekolah di daerah sebagian besar yang terjadi pertempuran. Di Juba pada Desember 2013 pasukan Dinka yang bersekutu dengan Kiir melakukan pembantaian kepada ratusan pria Nuer. Pada minggu berikutnya pasukan tentara Nuer yang bersekutu dengan tentara putih yang terdiri dari Nuer merebut kota Bor negara bagian Jonglei. Mereka melakukan pembantaian terhadap warga sipil Dinka.

Pada April 2014 warga sipil bersenjata menewaskan lebih dari 50 orang dalam serangan terhadap etnis Nuer yang berlindung di pangkalan PBB di Bor (Right, 2014). Kekerasan brutal

terhadap warga sipil terus terjadi tetapi kekerasan dalam konflik ini termasuk pembunuhan warga sipil karena suku mereka, pembakaran dan perusakan properti sipil dan penjarahan. Korban dalam konflik ini tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak-anak. Selama konflik di Sudan Selatan berlangsung, perekrutan dan penggunaan anak-anak ditujukan agar anak berpartisipasi dalam kelompok bersenjata. Ribuan anak-anak telah berjuang dalam konflik ini. Sejak perang yang dimulai pada tahun 2013 baik pemerintah maupun para pemimpin oposisi tidak mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak. Perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara telah menjadi ciri dari konflik-konflik ini. Anak laki-laki dianggap memiliki kewajiban untuk melindungi komunitas dan ternak mereka dalam menghadapi bahaya (Right, 2015).

Praktek perekrutan tentara anak tersebar luas dan konflik di Sudan Selatan sangat kompleks, terdiri dari berbagai kekuatan di bawah pemimpin atau komandan militer dengan pendekatan istimewa untuk anak-anak di bawah kendali mereka. Anak-anak direkrut dengan cara dipaksa untuk masuk dalam truk dan diangkut ke pertempuran atau kamp pelatihan dan diculik dengan ditodong senjata. Anak-anak yang bertempur menerima pelatihan dan seragam yang menekankan peran formal mereka sebagai tentara. Mayoritas tentara anak di Sudan selatan adalah anak laki-laki yang berumur sekitar 14 atau 15 tahun atau lebih tetapi mereka diperlakukan seperti tentara dewasa (Right, 2015). Tidak semua anak dijadikan sebagai tentara anak, beberapa dari mereka dipekerjakan sebagai juru masak atau pengawal komandan.

Akibat dari konflik ini banyak dari mereka menjadi trauma dan pasukan yang merekrut mereka memukuli dan menahan mereka agar tidak melarikan diri atau sebagai hukuman. Terlepas dari kesulitan ini, mereka merasa bersyukur karena menjadi bagian dari kelompok bersenjata dapat memberi perlindungan dan kesempatan untuk berjuang melindungi mereka. Pada Agustus 2015 pemerintah dan oposisi menandatangani perjanjian damai yang ditengahi oleh *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) membuka jalan bagi pemerintahan transisi dengan Presiden Kiir dan Wakil Presiden Machar untuk pemilihan nasional dalam waktu 3 tahun. kesepakatan ini menetapkan Pengadilan Hibrida untuk Sudan Selatan yang didirikan oleh Komisi Uni Afrika. Pengadilan campuran ini diperlukan karena untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukan dalam konflik ini (Right, 2015). Konflik bermula pada Desember 2013 terus berlanjut hingga semakin meningkat pada 2016, semakin memburuk hingga menjadi perhatian khusus bagi nasib anak-anak.

Dalam hukum internasional melarang praktik perekrutan dan penggunaan anak oleh angkatan bersenjata atau kelompok. Menurut hukum hak asasi manusia internasional melarang perekrutan atau penggunaan anak, menetapkan usia wajib militer yang sah oleh angkatan bersenjata atau kelompok pada usia 18 tahun atau lebih. *South Sudan Child Act* (2008) mendefinisikan anak yang berada dibawah usia 18 tahun. Di dalam Undang-undang pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada anak yang akan digunakan atau direkrut untuk terlibat dalam militer atau kegiatan militer, baik bersenjata maupun tidak, termasuk juga sebagai penjaga, informan, agen, juru masak, buruh serta untuk tujuan seksual atau apapun (Act, 2009).

Dalam banyak konflik, anak-anak mengambil bagian dalam pertempuran. Anak perempuan dan laki-laki digunakan dalam fungsi pendukung yang mengandung resiko besar. Tugas mereka tidak hanya sekedar menjadi tentara tetapi juga sebagai juru masak, mata-mata, porter bahkan tujuan seksual. Setiap tahunnya PBB menerima laporan mengenai anak-anak berusia 8 atau 9 tahun terkait dengan kelompok bersenjata, padahal dalam hukum internasional maupun hukum dalam negeri menyatakan bahwa anak-anak yang di bawah 18 tahun tidak dapat direkrut. Tentara anak dihadapkan pada tingkat kekerasan yang tinggi, sebagai saksi, korban atau pelaku.

Definisi tentara anak dijelaskan *United Nation* berdasarkan *Paris Principle on the Involvement of Children in Armed Conflict* 2007 adalah seorang anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata mengacu pada setiap orang di bawah usia 18 tahun yang telah direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata dalam kapasitas apapun termasuk dan tidak terbatas untuk anak laki-laki dan perempuan digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli, mata-mata dan untuk tujuan seksual (UN, n.d.). Tentara anak adalah korban yang partisipasinya dalam konflik membawa dampak bagi kesejahteraan fisik dan emosional. Penggunaan tentara anak setiap tahunnya terus bertambah serta pelanggaran lainnya yang menimpa anak-anak dilakukan oleh semua pihak dalam konflik.

UNICEF melaporkan bahwa pelanggaran terhadap anak terus terjadi sejak 2013, terdapat 2.342 yang terbunuh atau cacat, 3.090 yang diculik dan 1.130 mengalami pelecehan seksual serta 303 serangan atau penggunaan militer terhadap sekolah dan rumah sakit. Pada November PBB mendokumentasikan setidaknya 50 anak yang telah diculik dan direkrut di wilayah Greater Upper Nile dan di wilayah Greater Bahr el Ghazal (UN.news.org, 2016). Terjadi peningkatan dalam jumlah pelanggaran pada tahun 2014 dengan total 514 insiden yang berdampak pada 16.307 anak (UN, 2015). Konflik terus berlanjut dengan bentrokan yang intens antara SPLA dengan pemerintah serta sekutu mereka di Unity dan Upper Nile States.

Perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 2015 tidak membawa perubahan serta pertempuran terus berlanjut, terdapat 1.051 insiden yang berdampak pada 28.788 anak-anak serta 601 insiden di Unity State. PBB memverifikasi terdapat 159 insiden perekrutan dan penggunaan yang korbannya 2.596 anak. Hampir tujuh puluh persen dikaitkan dengan SPLA sejumlah 110, pasukan keamanan pemerintah lainnya dan pasukan sekutu termasuk faksi Cobra dari Tentara Demokrat Sudan Selatan yang disatukan ke dalam SPLA pada tahun 2015. Perekrutan dan penggunaan anak dilakukan juga oleh pemerintah sejumlah 19, kelompok bersenjata *Johnson Olony* 11, *The Arrow Boys* 4 dan *White Army* 3. Anak-anak menggunakan seragam militer (UN, 2016).

Terdapat 131 insiden pembunuhan dan lima puluh sembilan orang cacat, pada 2015 terjadi peningkatan yang tajam dibandingkan dengan 2014. Sebanyak 103 insiden kekerasan seksual yang dialami 430 anak dan dikaitkan dengan SPLA serta tentara keamanan pemerintah lainnya, insiden tersebut terjadi di Unity State. Sepuluh serangan terhadap sekolah dilakukan oleh SPLA, mereka melakukan penghancuran, perusakan, penjarahan dan perekrutan anak-anak. Dalam insiden di Upper Nile State, 36 anak ditangkap oleh kelompok bersenjata Johnson Olony yang bersekutu dengan SPLA (UN, 2016). Situasi keamanan semakin memburuk setelah terjadinya bentrokan di Juba pada bulan Juli 2016 antara SPLA dan tentara Oposisi, secara keseluruhan pada tahun 2016 tingkat pelanggaran terhadap anak memiliki tingkat yang sama dengan tahun 2015.

Terdapat 169 perekrutan dan penggunaan yang dialami 1.022 anak, anak-anak terlihat mengenakan seragam militer dan membawa senjata di wilayah Upper Nil, Khatulistiwa dan Bahr el-Ghazal. Anak-anak diangkut oleh SPLA dari Jonglei, Lakes dan negara-negara Unity ke bagian dari negara ini untuk melakukan pelatihan dan penempatan militer. Terdapat 101 insiden pembunuhan dan melukai anak-anak yang dialami oleh 108 dan 71 anak-anak yang sebagian besar terjadi di Bahr el-Ghazal barat dan Central Equatoria. Serangan juga terjadi terhadap tujuh belas sekolah dan rumah sakit dan dua puluh delapan fasilitas kesehatan. Sebanyak tujuh belas insiden penculikan yang dialami 180 anak sebagian besar terjadi di Unity dan Western Equatoria. Dalam satu insiden berskala besar di Unity terdapat seratus anak laki-laki yang berusia empat belas tahun diculik oleh SPLA untuk tujuan perekrutan dan dipindahkan ke Juba untuk melakukan pelatihan militer (UN, 2017).

Perekrutan dan penggunaan anak dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik tetap merupakan pelanggaran yang terus menerus. Terdapat 513 insiden yang dialami 5.723 anak

yang terdiri dari 5.320 laki-laki dan 403 perempuan, 2.948 diantaranya terjadi pada tiga bulan terakhir tahun 2014 dan 2015, 1.122 pada tahun 2016, 1.221 pada tahun 2017 dan 432 pada paruh pertama tahun 2018. Dari anak-anak yang direkrut dan digunakan 2.437 anak empat puluh tiga persen direkrut dan digunakan oleh pemerintah, termasuk SPLA 2.382 anak termasuk 124 perempuan, *the South Sudan National Police Service* (SSNPS) 49 laki-laki, *the South Sudan National Wildlife Service* (SSNWS) empat laki-laki, *the National Prison Service* (NPS) dua laki-laki. Lalu yang berkaitan dengan kelompok bersenjata anak-anak direkrut dan digunakan oleh pro-Machar SPLA dalam oposisi 1.447 anak termasuk 5 perempuan, pro-Taban Deng SPLA dalam oposisi 801 anak termasuk 46 perempuan, *the South Sudan National Liberation Movement* (SSNLM) 632 anak termasuk 218 anak perempuan, *Johnson Olony Army* 133 laki-laki, *the South Sudan Democratic Army-Cobra Faction* (SSDA-CF) 102 laki-laki, *White Army* 91 laki-laki dan *the South Sudan People's Patriotic Front* (SSPPF) 80 anak termasuk 10 perempuan. Daerah Unity, Upper Nile dan Jonglei tetap menjadi pusat perekrutan dan penggunaan anak (UN, 2018).

Anak perempuan juga direkrut dan digunakan serta diamati dalam seragam militer, membawa senjata dan menjaga pos pemeriksaan dengan tentara dewasa. Pada Januari 2017, terdapat perekrutan massal lebih dari 150 anak laki-laki yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di Unity (UN, 2018). Anak-anak direkrut dalam militer untuk meningkatkan jumlah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemimpin militer. Meskipun hal ini sudah dilarang dalam undang-undang nasional maupun hukum internasional, perekrutan dan penggunaan anak tetap saja dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Jumlah perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara tidak sedikit, UNICEF memiliki kewajiban untuk bekerja dalam memberi bantuan pada anak-anak. UNICEF bertugas dalam mengidentifikasi resiko yang dihadapi oleh anak-anak di Sudan Selatan selama konflik berlangsung, seperti perekrutan oleh kelompok bersenjata, kekerasan seksual, penculikan, pekerja anak dan pembunuhan. Hal ini untuk mencapai kesepakatan dalam mengembangkan layanan reintegrasi dengan keluarga dan anak-anak yang terlibat dalam militer. Anak-anak mendapatkan perawatan, dukungan psikososial, layanan pendidikan, memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual serta kampanye mengenai perlindungan anak (UN, 2018).

Terdapat 2.740 anak dibebaskan pada Januari 2015 dan Juni 2018. 1.875 anak ( 1.870 laki-laki dan 5 perempuan) dibebaskan oleh SSDA-CF, 484 anak (302 laki-laki dan 182 perempuan) dibebaskan oleh SSNLM, 314 anak (285 laki-laki dan 29 perempuan) dibebaskan

oleh pro- Taban Deng SPLA, 52 anak ( 27 laki-laki dan 25 perempuan) dibebaskan oleh SPLA pro-Machar, 8 anak ( 5 laki-laki dan 3 perempuan) dibebaskan oleh NSF serta 7 laki-laki dari SSNWS (UN, 2018). Pada tahun 2016, terdapat 215 anak yang dibebaskan oleh SSNLM yang pada saat itu menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Selain itu, 96 anak dibebaskan oleh SPLA dalam Oposisi. Anak-anak yang dibebaskan akan mendapatkan perawatan, dukungan psikososial dan layanan lainnya yang diberikan oleh UNICEF (Unicef.org, 2017).

UNICEF memiliki tiga peran yang penting dalam kasus tentara anak di Sudan Selatan. Tiga peranan penting tersebut yaitu, peran sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih peduli dan melindungi hak anak. Oleh karena itu, UNICEF mengkampanyekan “Anak-anak, Bukan Tentara” untuk mewujudkan kesepakatan masyarakat global bahwa tentara anak tidak boleh digunakan dalam konflik. Kampanye ini dirancang untuk membangkitkan dukungan internasional serta mendapatkan dukungan dari PBB serta organisasi regional dan masyarakat umum (UN, n.d.).

Peran kedua sebagai komunikator yang meliputi dakam pengumpulan data yang berada di lapangan untuk dilaporkan ke dalam forum. Selain itu UNICEF memiliki berbagai program yang bertujuan untuk menangani tentara anak di Sudan Selatan. Peran ketiga sebagai fasilitator yang mengupayakan dana, tenaga untuk menjalankan program dalam pembebasan tentara anak. Pemerintahan Sudan Selatan berkomitmen untuk tidak menggunakan anak-anak dalam konflik yang ditandatangani melalui *The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *The first optional protocol to the CRC*, *African Charter on the Rights and Welfare of the Child*, *South Sudan Child Act*, *The transitional Constitution of the Republic of South Sudan*, *Paris Principles*, *Cape Town Principles* (Unicef.org, n.d.).

UNICEF membantu pembebasan 3.677 anak di sudan selatan sejak 2015. Lebih dari 3.300 kasus pelanggaran berat hak anak yang telah dilaporkan ke badan pemantauan nasional sejak Desember 2013. Program reintegrasi UNICEF terbesar berada di Yambio yang berada di barayt daya Sudan Selatan, UNICEF melindungi identitas anak-anak untuk mencegah pembalasan dan perekrutan kembali, serta banyak pihak yang membantu mengadvokasi pihak-pihak untuk berhenti merekrut dan menggunakan anak-anak serta mendukung program reintegrasi UNICEF, tetapi tidak sedikit pula yang kembali kedalam kelompok bersenjata (Unicef.org, n.d.).

Konflik dan peperangan di Sudan Selatan membuat negara ini sulit dalam mencapai tujuannya yaitu untuk menciptakan kedamaian dan keamanan serta menghentikan konflik yang terjadi di negaranya. Dalam kasus ini, kedamaian tidak dapat dicapai dengan militerisasi anak-anak, karena anak-anak berhak mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan hidupnya. UNICEF sebagai institusi yang dapat menjamin dan melindungi hak anak-anak serta dapat membantu pemerintah Sudan Selatan untuk menstabilkan stabilitas nasional.

## KESIMPULAN

Pada konflik di Sudan Selatan ketidakmampuan negara dalam melindungi rakyatnya menyebabkan meningkatnya faktor kemiskinan dan minimnya keamanan, serta rendahnya pendidikan diperparah dengan konflik peperangan yang terjadi di negara tersebut. Apabila keadaan yang seperti ini terus berlangsung, negara dianggap gagal dalam menyediakan keamanan bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak mendapatkan perlindungan dalam perekrutan kelompok bersenjata, maka hal ini membutuhkan aktor lain selain negara untuk dapat melindungi hak anak-anak.

Oleh karena itu dibentuklah suatu rezim yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan negara. Teori organisasi internasional menjelaskan peranan organisasi internasional dalam menangani dan membantu permasalahan dalam negara, maka menjelaskan fungsi dari UNICEF dalam menangani tentara anak di Sudan Selatan. Pelanggaran yang terjadi di Sudan Selatan melanggar *human security* yang setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keamanan termasuk anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Act, T. C. (2009). *Elimination of child labour, protection of children and young persons; Hazardous child labour.*  
<http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83470/92194/F822057232/SDN83470.pdf>
- Archer, C. (2001). *International Organizations.*
- BBC.com. (2018, August 6). South Sudan profile - Timeline. *Bbc.Com.*  
<https://www.bbc.com/news/world-africa-14019202>
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post - Cold War.* Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Buzan, B. and L. H. (2009). *THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL SECURITY STUDIES.* Cambridge University Press.
- Duverger, M. (1972). *The Study of Politics.* London: Nelson.
- Firman, T. (2017). Sudan Selatan, Negara Baru yang Terus Bergejolak. *Tirto.Id.*  
<https://tirto.id/sudan-selatan-negara-baru-yang-terus-bergejolak-cqJz>
- hrw.org. (2015). *South Sudan: Terrifying Lives of Child Soldiers Children Describe Forced Recruitment, Trauma, Abuse.* <https://www.hrw.org/news/2015/12/14/south-sudan->

- [terrifying-lives-child-soldiers](#)
- International, C. S. (2018, September 24). CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL ANNUAL REPORT 2017-18: South Sudan. *Reliefweb.Int*. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CSI\\_annual\\_report\\_2018.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CSI_annual_report_2018.pdf)
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods & Techniques*. New Age International (P) Ltd.
- Nation, U. (2016). *HUMAN SECURITY HANDBOOK*.
- Okiror, S. (2019). Peace may bring freedom to South Sudan's child soldiers, but not the help they need. *The New Humanitarian*. <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/10/09/peace-may-bring-freedom-south-sudan-s-child-soldiers-not-help-they-need>
- Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? In *International Security* (pp. 87–102). MIT Press.
- Right, H. W. (2014a). Abuses by Government and Opposition Forces. *Human Right Watch*, diakses 13 feb 21. <https://www.hrw.org/report/2014/08/07/south-sudans-new-war/abuses-government-and-opposition-forces>
- Right, H. W. (2014b). *South Sudan's New War Abuses by Government and Opposition Forces*. [https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southsudan0814\\_ForUpload.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southsudan0814_ForUpload.pdf)
- Right, H. W. (2015). "We Can Die Too" Recruitment and Use of Child Soldiers in South Sudan. [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/southsudan1215\\_4.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/southsudan1215_4.pdf)
- Right, H. W. (2016). South Sudan. *Human Right Watch*, diakses 13 feb 21. <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/south-sudan#>
- Soemantri, B. (2019). PERAN UNMISS (UNITED NATIONS MISSIONS IN SOUTH SUDAN) DALAM PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN. *JOM FISIP, Vol 6*.
- Un.news.org. (2016). *Number of children recruited into South Sudanese conflict passes 17,000 – UNICEF*. <https://news.un.org/en/story/2016/12/547842-number-children-recruited-south-sudanese-conflict-passes-17000-unicef>
- UN. (n.d.). *Child Recruitment and Use*. <https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/>
- UN. (2015). *Children and armed conflict*.
- UN. (2016). *Children and armed conflict*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1611119.pdf>
- UN. (2017). *Children and armed conflict*. <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/72/361>
- UN. (2018). *Children and armed conflict in South Sudan*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1829924.pdf>
- UN. (2020). *Children and armed conflict in South Sudan*.
- Unicef.org. (n.d.). Stolen childhoods Children in armed groups in South Sudan. *Unicef.Org*. <https://www.unicef.org/southsudan/stolen-childhoods>
- Unicef.org. (2017). Hundreds of children released by armed groups in South Sudan. *Unicef.Org*. <https://www.unicef.org/southsudan/press-releases/hundreds-children-released-armed-groups-south-sudan>
- UNICEF. (n.d.). *Child Soldier*. <https://www.unicef.org/sudan/>
- Woods, P. (2006). *Successful Writing for Qualitative Reasearcher*. Routledge.